



Nasi, Ikan, Wortel Jadi Menu MBG di DIY



JAKARTA—Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berbeda antara satu wilayah dan lainnya disesuaikan dengan sumber bahan pangan yang diproduksi.

Annasa Rizki Kamalina, Akbar Evandio, & Triyo Handoko
redaksi@jibinews.co

▶ Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu MBG yang rencananya dimulai 2 Januari 2025.

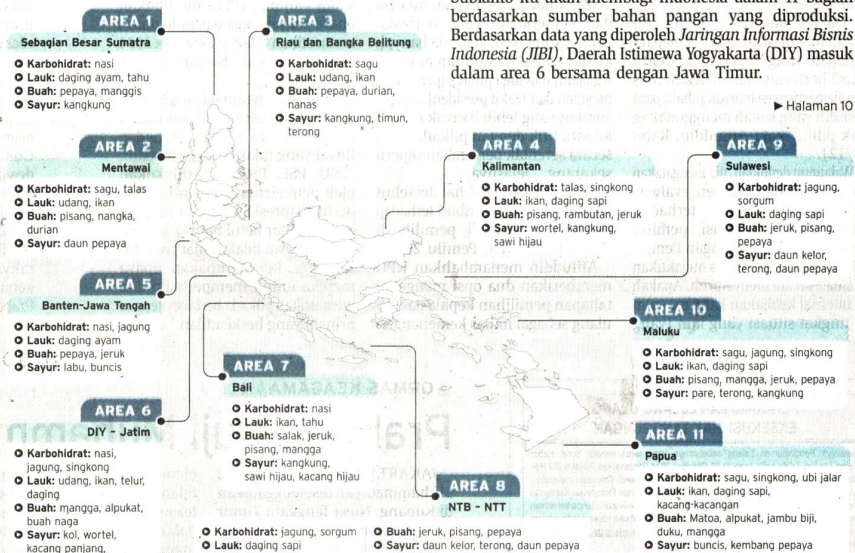
▶ Presiden Prabowo Subianto menyebut program MBG pernah diancam dengan IHSG yang akan turun imbas dari program tersebut.

Desain MBG yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Berdasarkan data yang diperoleh Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk dalam area 6 bersama dengan Jawa Timur.

▶ Halaman 10

MENU MAKAN BERGIZI GRATIS PER DAERAH

Pemerintah mulai menerapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Sejumlah uji coba sudah dilakukan di beberapa daerah. Menu untuk program MBG tersebut juga sudah disusun.



Nasi, Ikan,...

Menu di area 6 meliputi karbohidrat yang berasal dari nasi, jagung, atau singkong; lauk yang mencakup udang, ikan, telur, serta daging; buah seperti mangga, alpukat, atau buah naga; serta sayur kol, kacang panjang, dan wortel. *(selengkapnya lihat grafis)*

Mantan Direktur ID Food yang juga orang dekat Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu MBG yang rencananya dimulai 2 Januari 2025. Dirgayuza menjelaskan tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Tim penyusun menu MBG menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya. "Jadi kita punya berbagai makani yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan," ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12).

Dirgayuza yang juga penulis buku *Pangan Indonesia* menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan. Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara, untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Meski demikian, Dirgayuza tidak menyebutkan nominal perkiraan harga per menu tersebut. Sebelumnya, Prabowo Subianto telah mengumumkan harga sepori MBG untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000 dari semula Rp15.000. Prabowo mengungkapkan awalnya ingin mematok harga sepori MBG untuk setiap anak Rp15.000, tetapi anggaran negara terbatas.

Saham Jatuh

Adapun, Prabowo Subianto menyebut sejumlah pakar mengancam program MBG akan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). "Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawa kan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam, 'nantu harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia," kata Prabowo di NTT, Rabu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus. Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham. "Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun." Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya enggak punya saham dan

rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugil]," ujarnya.

Alokasi APBD

Sementara itu, pemerintah daerah di seluruh DIY bersiap mengalokasikan dana untuk program Makan Bergizi Gratis yang rencananya dimulai Januari 2025. Setidaknya dana Rp350 miliar dianggarkan untuk program ungulan dari Presiden Prabowo Subianto. Jumlah itu masih bisa berubah karena ada daerah yang belum mengalokasikan.

Kabupaten Sleman berencana mengalokasikan dana paling besar yakni Rp115 miliar untuk MBG. Kemudian Pemkot Jogja sebesar Rp90 miliar, Pemkab Bantul Rp52,7 miliar, Pemda DIY Rp42 miliar, serta Pemkab Gunungkidul Rp26 miliar.

Adapun anggaran untuk program MBG di Kulonprogo sudah dialokasikan dalam APBD 2025 sebesar Rp29,5 miliar. Sasaran program ini sendiri sebanyak 63.000 anak. Dana Rp29,5 miliar itu bersumber dari belanja tak terduga sebesar Rp14,4 miliar dan pemotongan belanja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak Rp15,1 miliar. Pemotongan belanja OPD untuk program makan bergizi gratis merata sebesar 11% dari total belanja seluruh dinas di Pemkab Kulonprogo.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo menjelaskan anggaran Rp29,5 miliar itu diperoleh dari kemampuan fiskal Pemkab. Ketentuannya dari kemampuan fiskal yang rendah itu dipotong sebesar 7,75% untuk program makan bergizi gratis tersebut.

Kepala BKAD Kulonprogo, Taufiq Amrullah, menyampaikan kemampuan fiskal itu ditunjukan dengan pendapatan asli daerah (PAD). "Itu sama besarnya dengan 7,75 persen dari PAD juga," ungkapnya.

Taufiq menjelaskan anggaran tersebut sudah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD Kulonprogo. "Terkait dengan dampaknya dengan pemotongan belanja OPD nanti dievaluasi bersama agar semuanya tetap efektif dan efisien," jelasnya.

Besaran dana untuk makan bergizi gratis di Kulonprogo, jelas Taufiq, tidak mencukupi jika hanya bersumber dari APBD. "Kalau lihat sarasannya ada 60-an ribu anak yang jadi sasaran seperti ini tidak mencukupi," ungkapnya.

Bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat, kata Taufiq, diperlukan untuk menyelesaikan program makan bergizi ini di Kulonprogo. "Anggaran tersebut sekarang juga masih di-review Gubernur DIY, tentu kami berharap ada bantuan dari pihak lain agar program ini sukses," jelasnya.

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Nur Wahyudi mencatat 63.000 anak ini berasal dari 1.200-an lembaga pendidikan. "Termasuk dari TK, tempat penitipan anak, sampai PKBM [pusat kegiatan belajar masyarakat]," terangnya.

Sejauh ini Disdikpora, jelas Wahyudi, baru ditugasi mendata sasaran peserta program tersebut. "Lebih jauhnya lagi kami juga masih menunggu arahan, kami mendukung program ini karena tujuannya baik meningkatkan kualitas kesehatan anak," jelasnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005